Vol. 20 No. 1 (2024) pp. 217-226
INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen
P-ISSN 0216-7786
E-ISSN 2528-1097

Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Sarlen[1], Mega Norsita[2]✉

[1]Universitas Mulawarman, Samarinda.
[2]Universitas Mulawarman, Samarinda.
✉Corresponding author: mega.norsita@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, karakter eksekutif, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 126 data perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Abstract

This study aims to examine the effect of independent commissioners, executive character, and institutional ownership on tax avoidance in manufacturing companies in the consumer goods sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018 – 2022. This type of research is quantitative research using secondary data. Sampling was determined using the purposive sampling method and obtained as many as 126 data on manufacturing companies in the consumer goods sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022. The results of this study show that independent commissioners have a negative effect on tax avoidance, executive character has a positive effect on tax avoidance, and institutional ownership has no effect on tax avoidance.

Article history
Received 2024-01-10
Accepted 2024-02-20
Published 2024-02-26

Kata kunci
Komisaris Independen; Karakter Eksekutif; Kepemilikan Institusional; Penghindaran Pajak.

Keywords
Independent Commissioner; Executive Character; Institutional Ownership; Tax Avoidance.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Copyright © 2024 Sarlen, Mega Norsita

1. Pendahuluan

Pajak menjadi penerimaan terbesar dalam pendapatan negara yaitu, Rp1.717,8 triliun dari total pendapatan negara Rp2.626,4 triliun dalam APBN 2022 (Kementerian Keuangan, 2023). Penerimaan tersebut digunakan sebagai pembiayaan bagi pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia sangat bergantung pada pendapatan pajak. Perusahaan memainkan peran signifikan dalam kontribusi penerimaan pajak. Sebagai pihak yang memiliki kontribusi besar, hampir semua perusahaan dalam menjalankan bisnisnya pasti menginginkan laba yang maksimal dengan pengeluaran yang minimal. Biasanya perusahaan akan berupaya untuk membayar pajak seminimal mungkin. Hal ini tentu bertentangan dengan pemerintah yang selalu mengoptimalkan penerimaan pajak negara setiap tahunnya. Dampak dari perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dapat menyebabkan terjadinya dugaan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan, yang pada gilirannya memengaruhi penerimaan pajak. Upaya untuk mengurangi kewajiban pajak yang diperbolehkan oleh hukum, yang melibatkan pemanfaatan celah-celah dalam peraturan, disebut sebagai penghindaran pajak (Mita Dewi, 2019). Dalam analisis "*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*", terungkap bahwa Indonesia mengalami dampak finansial yang signifikan akibat praktik penghindaran pajak. Adanya perkiraan kerugian sekitar US$4,86 miliar atau sekitar Rp67,6 triliun menandakan bahwa mayoritasnya berasal dari upaya penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Di sisi lain, kontribusi sekitar US$78,83 juta atau sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak individu (Sukmana, 2020). Selain itu kasus penghindaran pajak juga banyak terjadi pada sektor industri barang konsumsi dilansir pada cnbcindonesia.com kasus PT Bentoel Investama penerimaan pajak Indonesia mengalami kerugian sekitar USD13,7 juta, kemudian pada PT Indofood Sukses Makmur tahun 2015 melakukan pendirian perusahaan baru lalu mengalihkan aset dan liabilitasnya, kemudian pada PT Unilever Tbk melakukan transfer pricing pada tahun 2015 dan kemudian pada PT Waskita karya tahun 2018 melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan modal yang berasal dari utang atau pinjaman.

Penghindaran pajak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adanya keberadaan seorang komisaris independen berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak di dalam suatu perusahaan. Seorang anggota dewan komisaris independen di dewan direksi tidak terikat dalam hubungan timbal balik dengan anggota direksi, pemegang saham pengendali, atau lembaga pengawas lainnya. Di samping itu, komisaris independen juga tidak menduduki posisi sebagai direktur perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemilik bisnis (Zemzem et al., 2013). Komisaris independen menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Adanya komisaris independen pada suatu perusahaan bertujuan sebagai penyeimbang antara pemegang saham pengendali maupun non pengendali dalam pengambilan keputusan. Faktor kedua yang memengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak yaitu karakter eksekutif. Penghindaran pajak seringkali terjadi karena kebijakan yang diterapkan oleh kepemimpinan perusahaan. Sebagai penentu keputusan dan kebijakan di tingkat eksekutif, para eksekutif memiliki beragam karakter dalam melaksanakan tugas mereka, seperti *risk taker* dan *risk averse* (Syahruddin et al., 2020). Perusahaan yang memiliki eksekutif berkarakter *risk taker* biasanya cenderung memiliki karakter pengambil keputusan berisiko, dimana eksekutif akan lebih berani dalam membuat kebijakan dengan risiko tinggi. Namun, bila sebuah organisasi dipimpin oleh eksekutif yang cenderung menghindari risiko (*risk averse*), kemungkinan besar enggan mengambil keputusan berisiko tinggi dan kurang berani untuk merumuskan kebijakan yang dapat berdampak besar. Faktor lainnya Perusahaan memiliki berbagai bentuk kepemilikan, di antaranya adalah kepemilikan institusional, yang mencirikan persentase saham dimiliki oleh lembaga pada akhir tahun (Simarmata & Cahyonowati, 2014). Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan secara optimal dan mengurangi peluang manajer perusahaan untuk bersikap oportunistik serta mempengaruhi berbagai tindakan maupun kebijakan yang diputuskan oleh perusahaan seperti tindakan untuk mengurangi beban pajak yang timbul dan pajak yang dilakukan secara agresif.

Beberapa faktor diatas seperti komisaris independen, karakter eksekutif, dan kepemilikan institusional kemungkinan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Faktor-faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu dan terdapat persamaan hasil maupun perbedaan hasil dalam penilitian. Penelitian yang dilakukan oleh Noorica & Asalam (2021) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan studi lain menjelaskan bahwa keberadaan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Penelitian Feranika (2017) & Lukito & Oktaviani (2022) mengambil kesimpulan bahwa karakter eksekutif yang semakin tinggi atau bersifat risk taker turut melakukan penghindaran pajak. Penelitian Mita Dewi (2019) menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan institusional. Sebaliknya, dalam penelitian Afrika (2021) disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, penelitian Fitria (2018) menunjukan tidak ada pengaruh ketiga variabel terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti pada beberapa studi sebelumnya, ditemukan perbedaan hasil dalam berbagai penelitian mengenai pengaruh komisaris independen, karakter eksekutif, dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini memicu minat penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut.

2. Metode

Populasi penelitian ini mencakup entitas perusahaan manufaktur yang berfokus pada sektor barang konsumsi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022. Pemilihan sampel untuk penelitian ini dilakukan melalui metode *purposive sampling*, yang mengacu pada proses pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria dan pertimbangan tertentu. Metode penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dalam bentuk angka dan numerik. Data-data untuk penelitian ini diperoleh melalui analisis laporan tahunan serta laporan keuangan perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah melalui proses audit. Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses langsung situs perusahaan pada rentang waktu 2018-2022. Kriteria utama dalam sampel: (1) Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu 2018-2022 (2) Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama berturut-turut pada rentang waktu 2018-2022 (3) Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak mengalami kerugian pada rentang waktu 2018-2022.

2.1. Variabel penelitian dan pengukurannya

1) Penghindaran Pajak

Menurut Dyreng et al., (2010) penghindaran pajak diukur melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang mencerminkan jumlah pembayaran pajak tunai terhadap laba sebelum pajak penghasilan. Diharapkan tarif pajak tunai CETR dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Data penghindaran pajak dapat diketahui dari laporan keuangan bagian laporan laba rugi dan arus kas operasi. Adapun rumus untuk menghitung CETR adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{Pembayaran\ pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

2) Komisaris Independen

Menurut Puspita & Harto (2014) indeks komisaris independen dihitung dengan membagi jumlah dewan komisaris independen di perusahaan dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris. Informasi mengenai dewan komisaris dapat ditemukan dalam bagian informasi umum pada laporan keuangan.

$$INDEP = \frac{JUMLAH\ DEWAN\ KOMISARIS\ INDEPENDEN}{JUMLAH\ SELURUH\ DEWAN\ KOMISARIS}$$

3) Karakter Eksekutif

Penelitian ini menilai karakter eksekutif dengan menggunakan metode pengukuran risiko perusahaan yang melibatkan perhitungan rasio EBIT (*Earning Before Income Tax*) terhadap total aktiva perusahaan (Paligorova, 2010). Tingkat risiko suatu perusahaan akan mencerminkan sifat individu pimpinan perusahaan sebagai *risk taker* atau *risk averse*. Data EBIT didapatkan melalui laporan tahunan perusahaan bagian laporan laba rugi. Sedangkan total aset dalam perhitungan karakter eksekutif diketahui melalui laporan posisi keuangan. Rumus yang digunakan untuk menghitung risiko perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{RISK = \frac{EBIT}{TOTAL\ ASET}}$$

Eksekutif yang menunjukkan keterlibatan di tingkat *corporate risk* di atas rata-rata akan diberi penilaian 1, mencerminkan sifatnya sebagai pengambil risiko yang berani mengambil keputusan dengan tingkat risiko yang tinggi. Sebaliknya, bagi eksekutif yang menunjukkan keterlibatan di tingkat *corporate risk* di bawah nilai rata-rata, akan diberi penilaian 0, mencerminkan sifatnya sebagai individu yang cenderung menghindari risiko dan memilih untuk tidak mengambil keputusan yang melibatkan risiko tinggi (Ekaputra Tj *et al*., 2020).

4) Kepemilikan Institusional

Menurut Tarjo (2008) variabel kepemilikan institusional menggunakan perhitungan dengan membagi jumlah saham institusi di perusahaan dengan keseluruhan jumlah saham yang beredar. Saham institusional dapat diketahui dari catatan atas laporan keuangan bagian modal saham. Adapun pengukurannya sebagai berikut:

$$\boldsymbol{KEI = \frac{JUMLAH\ SAHAM\ INSTITUSIONAL}{JUMLAH\ SAHAM\ BEREDAR}}$$

2.2. Alat Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji kelayakan model, uji asumsi klasik dan analisis linier berganda diimplementasikan menggunakan perangkat lunak SPSS sebagai alat bantu dengan persamaan yang menjadi instrumen pengujian hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan:

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \varepsilon}$$

Keterangan:

Y : Penghindaran pajak
X1 : Komisaris Independen
X2 : Karakter Eksekutif
X3 : Kepemilikan Institusional
α : Konstanta
β1-β3 : Koefisien regresi variabel independen
ε : term of error (tingkat kelonggaran kesalahan)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan data terkait karakteristik sampel, mencakup nilai minimal, maksimal, rata-rata, dan deviasi standar dari setiap variabel penelitian.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistic

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komisaris Independen	126	0,166	1.000	0,40747	0,105561
Karakter Eksekutif	126	0,022	0,299	0,13878	0,058059
Kepemilikan Institusional	126	0,425	1.000	0,79120	0,132503
Penghindaran Pajak	126	0,048	0,489	0,24266	0,092490
Valid N (listwise)	126				

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui jumlah pengamatan dalam peneliian ini sebanyak 126 sampel penelitian. Variabel independen Komisaris Independen (X1) menunjukkan nilai minimum 0,166 di perusahaan Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020-2022, dan maksimum 1.000 di perusahaan Wahana Interfood Nusantara Tbk pada tahun 2018. Rata-rata (*mean*) mencapai 0,40747 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,10556.Variabel independen Karakter Eksekutif (X2) mencatat nilai minimum 0,022 di perusahaan Wismilak Inti Makmur Tbk tahun 2019, sedangkan maksimum 0,299 terdapat di perusahaan Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2020. Rata-rata (mean) mencapai 0,13878 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,058059. Variabel independen Kepemilikan Institusional (X3) menunjukkan nilai minimum 0,425 dan maksimum 1.000, terlihat pada perusahaan Wahana Interfood Nusantara Tbk pada tahun 2018 & 2021. Rata-rata (mean) mencapai 0,79120 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,132503. Variabel dependen Penghindaran Pajak (Y) memiliki nilai minimum 0,048 di perusahaan Phapros Tbk tahun 2020, dan maksimum 0,489 di perusahaan Tempo Scan Pacific Tbk pada tahun 2020. Rata-rata (mean) mencapai 0,24266 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,092490.

3.2. Uji Kelayakan Model

Uji F digunakan untuk menentukan apakah model regresi layak digunakan dalam penelitian atau tidak layak digunakan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,092	3	0,031		
Residual	0,978	122	0,008	3,807	0,012[b]
Total	1,069	125			

Berdasarkan data pada tabel diatas, tergambar dengan jelas bahwa angka signifikansi memiliki nilai sebesar 0,012, yang mana lebih kecil daripada batas 0,05. Oleh karena itu, dapat diungkapkan bahwa model regresi ini layak digunakan.

3.3. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah distribusi data dari variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi menunjukkan pola distribusi normal atau tidak.

Tabel 3. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual (Sebelum Outlier)	*Unstandardized Residual* (Setelah Outlier)
N		140	126
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000000	0,0000000
	Std. Deviation	1,33152810	0,08844350
Most Extreme Differences	Absolute	0,328	0,066
	Positive	0,328	0,062
	Negative	-0,297	-0,066
Test Statistic		0,328	0,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,000[c]	0,200[c,d]

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai *Asymp. Sig*. dari uji normalitas adalah 0,000, yang jauh lebih rendah daripada nilai signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tidak terdistribusi secara normal sehingga dilakukan outlier agar data yang akan diteliti berdistribusi normal. Setelah dilakukan outlier terdapat 14 data ekstrim yang dihilangkan, sehingga data yang tersisa untuk digunakan sebanyak 126 sampel. Hasil analisis data setelah penanganan outlier menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig*. sebesar 0,200, melebihi nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa data telah mengikuti distribusi normal.

3.4. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan maksud menguji apakah ada perbedaan varians yang signifikan antara residual dari satu observasi ke observasi lain dalam suatu model regresi.

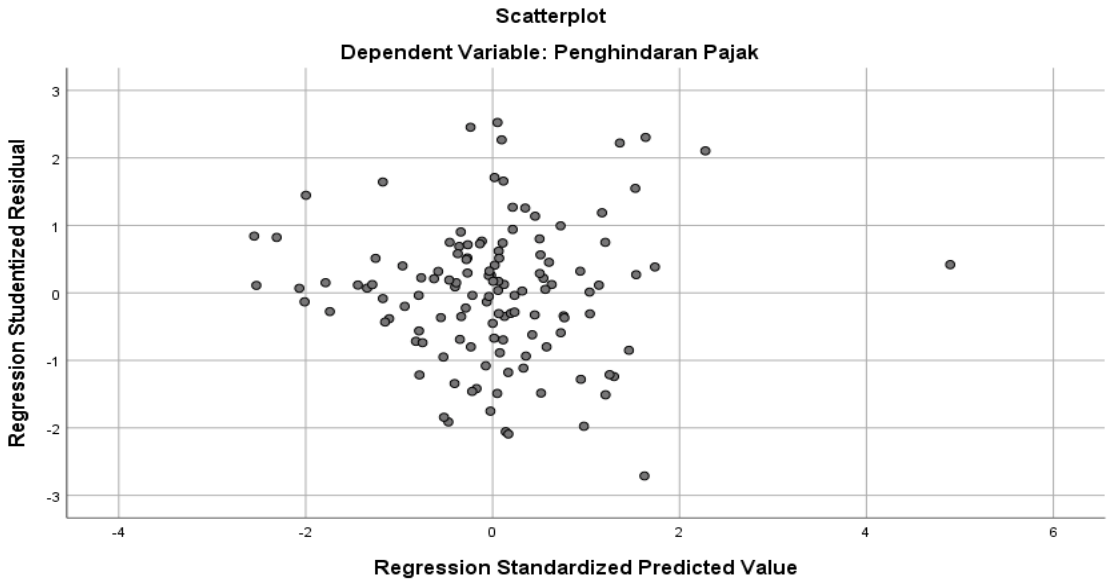

Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar 1 menunjukan penyebaran acak titik data di atas dan di bawah nol pada sumbu Y. Dari gambara tersebut, terlihat bahwa tidak terdapat pola yang dapat diidentifikasi dalam distribusi titik-titik tersebut. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah analisis untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan persentase variabel terikat (penghindaran pajak) terhadap variabel bebas (komisaris independen, karakter eksekutif, kepemilikan institusional).

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,293[a]	0, 086	0, 063	0, 08952

Tabel 4 menunjukan bahwa nilai R square (R^2) sebesar 0,086 atau sama dengan 8,6%. Berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel terikat yaitu penghindaran pajak dapat menjelaskan sebesar 8,6% oleh variabel bebas yang digunakan yaitu komisaris independen, karakter eksekutif, dan kepemilikan institusional. Adapun 91,4% sisa penjelasan berasal dari beragam variabel dan faktor lain yang tidak ditelitii dalam penelitian ini.

Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menggambarkan hubungan kompleks antara berbagai variabel, termasuk satu variabel dependen dan beberapa variabel independen.

Tabel 5. Hasil Analisis Linier Berganda

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	0,191	0,057		3,349	0,001
Komisaris Independen	0,194	0,076	0,221	2,552	0,012
Karakter Eksekutif	-0,313	0,146	-0,197	-2,154	0,033
Kepemilikan Institusional	0,021	0,064	0,030	0,331	0,741

Dengan merujuk pada tabel 5 terungkaplah persamaan linier berganda yang menyajikan hasil tersebut.

$Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + \varepsilon$

$Y = 0,191 + 0,194X1 – 0,313X2 – 0,021X3 + \varepsilon$

Nilai konstanta (α) sebesar 0,191 yang berarti jika variabel independen yaitu, komisaris independen, karakter eksekutif dan kepemilikan institusional dimasukan dalam persamaan regresi maka nilai konstanta menunjukan nilai CETR sebesar 0,191. Nilai koefisien regresi (X1) yaitu variabel komisaris independen menunjukan bahwa setiap kenaikan komisaris independen sebesar 1 maka CETR akan bertambah sebesar 0,194. Nilai koefisien regresi (X2) yaitu variabel karakter eksekutif menunjukan bahwa setiap kenaikan karakter eksekutif sebesar 1 maka CETR akan berkurang sebesar 0,313. Nilai koefisien regresi (X3) yaitu variabel kepemilikan institusional menunjukan bahwa setiap kenaikan kepemilikan institusional sebesar 1 maka CETR akan bertambah sebesar 0,021.

1) Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Koefisien regresi variabel komisaris independen (X1) ialah 0,191, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012 (sig < 0,05). Artinya, semakin meningkat nilai komisaris independen, maka akan semakin meningkat pula nilai CETR perusahaan, menandakan penurunan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebab, sifat CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama didukung, semakin banyak jumlah komisaris independen cenderung menurunkan peluang penghindaran pajak. Komisaris independen memiliki peran penting dalam memantau aktivitas manajemen terkait perilaku oportunistik yang dilakukan. Oleh karena itu komisaris independen harus memiliki pemahaman mendalam tentang masalah perpajakan dan praktik perpajakan perusahaan. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat bertindak

sebagai perantara yang efektif antara manajemen perusahaan dan pemegang saham dalam hal penghindaran pajak. Selain itu komisaris independen dari beberapa perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi ternyata berasal dari kalangan akademisi seperti pada perusahaan PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT Kalbe Farma, PT Sekar Bumi Tbk. Komisaris independen, khususnya yang memiliki latar belakang akademisi, sering membawa perspektif etika tinggi dan nilai integritas ke dewan komisaris. Pada umumnya, para akademisi menunjukkan kecenderungan memiliki standar etika yang tinggi, sehingga cenderung mengurangi keinginan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang kontroversial atau tidak etis. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Hidayat *et al*., (2022) yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen pada penghindaran pajak berpengaruh negatif. Hal ini disebabkan adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan justru akan bertanggung jawab dalam memantau manajemen guna memastikan agar perusahaan tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

2) Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Variabel karakter eksekutif (X2) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,313 dengan tingkat signifikansi 0,033 (sig < 0,05). Semakin tinggi nilai karakter eksekutif, semakin rendah nilai CETR perusahaan, mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan meningkat. Sebab, sifat CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua didukung, semakin karakter eksekutif bersifat *risk taker* cenderung mendorong penghindaran pajak.

Tabel 6. Hasil Perbandingan Karakter Eksekutif (nominal)

Keterangan	*Risk Taker*	*Risk Averse*	Total
Jumlah Observasi	68	58	126
Persentase	54%	46%	100%

Berdasarkan tabel 6, perbandingan karakter eksekutif yang menjelaskan bahwa terdapat 68 observasi (54%) yang menunjukkan sifat *risk taker* sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* sebanyak 58 (46%). Hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas perusahaan barang konsumsi yang menjadi objek penelitian memiliki eksekutif dengan karakter *risk taker* yang berani untuk mengambil keputusan dengan resiko yang besar termasuk melakukan praktik penghindaran pajak untuk mendapatkan laba sebesar besarnya. Pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa sikap karakter eksekutif yang berani mengambil resiko (*risk taker*) untuk memanfaatkan celah hukum dalam menghindari pajak lebih berperan signifikan dibandingkan peran kepemilikan institusional walaupun dalam jumlah besar. Persentase kepemilikan institusional pada penelitian ini lebih besar dari 50%. Hasil dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukito & Oktaviani (2022) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif yang cenderung bersedia mengambil risiko memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan karakteristik sebagai pengambil risiko, para eksekutif cenderung menggunakan keterampilan kepemimpinan mereka untuk secara berani mengambil keputusan yang berisiko, dengan tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan.

3) Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Koefisien regresi pada variabel kepemilikan institusional (X3) sebesar 0,021, dengan tingkat signifikansi mencapai 0,741 (nilai sig > 0,05). Semakin tinggi nilai kepemilikan institusional maka semakin tinggi nilai CETR perusahaan yang berarti tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin menurun. Namun karena pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang memengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga faktor-faktor tersebut dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Sebab, sifat CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh terhadap

penghindaran pajak sehingga H3 tidak didukung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dan praktik penghindaran pajak. Implikasinya, pemegang saham institusional mungkin tidak efektif sebagai pengendali yang mampu mengontrol perusahaan dengan baik terkait tindakan manajemen terkait penghindaran pajak. Meskipun seharusnya diharapkan bahwa kepemilikan institusional dapat berperan dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan memotivasi manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi jangka panjang. Namun disisi lain kepemilikan institusional mendapatkan keuntungan ketika perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak, yang berpotensi meningkatkan profit dan memberikan keuntungan kepada pemegang saham.Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2018), yang menyatakan bahwa tindakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan suatu institusi karena struktur perusahaan dalam sektor manufaktur barang konsumsi mungkin tidak sepenuhnya bergantung pada kepemilikan institusional, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kompetisi pasar dan tuntutan konsumen. Keterlibatan kepemilikan institusional melibatkan pengawasan dan pengendalian manajemen, tetapi institusi lebih condong untuk mengandalkan peran komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian perusahaan. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab komisaris yang juga mewakili kepentingan pemilik institusional (Hidayat *et al*., 2022).

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil, sebagai berikut: Semakin besar jumlah komisaris independen maka cenderung akan menurunkan peluang penghindaran pajak. Semakin karakter eksekutif bersifat *risk taker* cenderung akan mendorong penghindaran pajak. Besar kecilnya kepemilikan institusional tidak memberi pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Daftar Pustaka

Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *6*(2), 132. https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968

Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, *85*(4), 1163–1189. https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163

Faisal. (2005). Analisis Agency Costs, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VII. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, *8*(2), 197–207.

Feranika, A. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, *2*(2), 12–21.

Fitria, G. N. (2018). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, karakter ekskutif dan size terhadap tax avoidance. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, *11*(3), 438–451.

Hidayat, T., Ayunita Ajengtiyas, A. A., & Ginting, R. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen Publik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akunida*, *8*(1), 49–64. https://doi.org/10.30997/jakd.v8i1.4738

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html

Kementerian Keuangan. (2023). *Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. Diakses Pada 4 Februari 2023. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa

Löw, M. (2006). The Social Construction of Space and Gender. *European Journal of Women's Studies*, *13*(2), 119–133. https://doi.org/10.1177/1350506806062751

Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, *6*(1), 202–211. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.532

Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, *9*(1), 40. https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51

Noorica, F., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(2), 2021.

Paligorova, T. (2010). *Corporate Risk Taking and Ownership Structure Corporate Risk Taking and Ownership*.

Parjiono, Hastiadi, F. F., Wardhana, I. W., & Sujai, M. (2018). *Kebijakan multilateral dan pembangunan ekonomi indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*.

Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, *8*(1), 91–103. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487

Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. *3*, 1–13.

Rd. Mohd. Raditya Ekaputra dan Asmaul Husna. (2020). Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity, Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). In *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia* (Vol. 3, Issue 2). https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2206

Simarmata, A. P. P., & Cahyonowati, N. (2014). Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2012). *Diponegoro Journal Of Accounting*, *3*, 1–13. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2019). *The Master Book Of SPSS*. Startup.

Sukmana, Y. (2020). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak

Syahruddin, S., Suun, M., & Lannai, D. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghidaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Property,Real Estate, Dan Building Construction Yang Terdaftar Di Bei. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, *3*(2), 109–133. https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4408

Tarjo. (2008). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang saham serta Cost of Equity Capital. *Simposium Nasional Akuntansi XI*.

Zemzem, A., Khaoula, F., & Ftouhi, K. (2013). The Effects of Board of Directors' Characteristics on Tax Aggressiveness. In *Research Journal of Finance and Accounting www.iiste.org ISSN* (Vol. 4, Issue 4). Online. https://www.researchgate.net/publication/311766760